

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGURANGI TINGKAT
PENGANGGURAN DI KABUPATEN ACEH BARAT
(Studi Kasus : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Administrasi Negara (S.AN)

OLEH

T HARRI SETIAWAN
NIM. 1505905010108



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH – ACEH BARAT
2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Meulaboh, 27 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : T Harri Setiawan
NIM : 1505905010108

Dengan judul : Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran
Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus : Dinas Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi Aceh Barat)

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

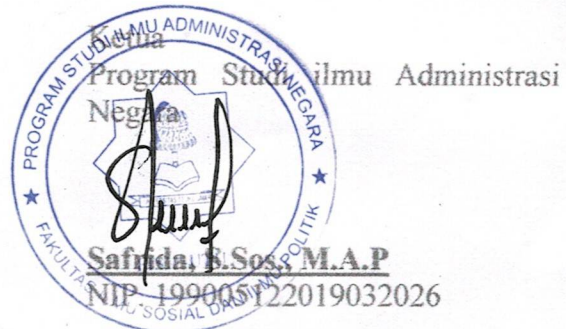
Zuhrizal Fadhly, SE., M.Si
NIND. 0019048405

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



NIP. 196307131991021002



NIP. 199005122019032026



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Meulaboh, 27 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : T Harri Setiawan

NIM : 1505905010108

Dengan judul : Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran
Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus : Dinas Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi Aceh Barat)

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian dan dinyatakan memenuhi syarat
untuk lulus.

Menyetujui,
Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Zuhrizal Fadhly, SE., M.Si
2. Anggota : Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si
3. Anggota : Najamudin, S.E., M.Si



PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : T Harri Setiawan
NIM : 1505905010108

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar keserjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 27 Juni 2022

Saya yang membuat pernyataan,



T Harri Setiawan
NIM. 1505905010108

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : T Harri Setiawan

NIM : 1505905010108

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar keserjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

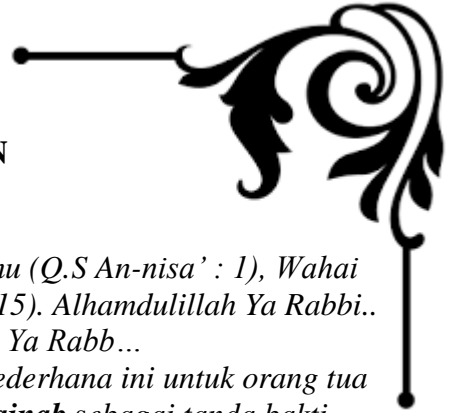
Meulaboh, 27 Juni 2022

Saya yang membuat pernyataan,

T Harri Setiawan

NIM. 1505905010108

KATA PERSEMBAHAN



*Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (Q.S An-nisa' : 1), Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah (Q.S Fatir :15). Alhamdulillah Ya Rabbi..
Segala Puji ku panjatkan kepada Mu Ya Rabb...*

*Dengan setulus hati, Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang tua tercinta Ayahanda **Teuku Toeng** dan Ibunda **Cut Zainab** sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga. Karena keduanya adalah segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dan hidup terasa begitu mudah serta penuh kebahagiaan. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segala bentuk cinta dan kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, nasehat, serta do'a tulusnya yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan.*

*Terima kasih ku ucapkan kepada cutkak **Cut Hartati** yang sudah membantu dalam segala hal serta kebutuhan saya semasa kuliah dan telah memberikan segala bentuk cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga, selalu mendukung, serta menemani dalam segala keadaan.*

*bapak dosenku yang baik hati **Zuhrizal Fadhly, SE., M.Si** izinkanlah aku mengantarkan ucapan terimakasih untukmu, sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia mengantarkanku untuk mengantungiku gelar sarjana. Serta kepada bapak **Fadhil Ilhamsyah, M.Si** yang telah meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan dukungan dan kesempatan untuk saya dapat melakukan konsultasi diluar jam kerja bapak demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini dan kepada bapak **Najamudin, M.Si** yang telah meluangkan waktu untuk menguji karya skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diajarkan menuntun saya menjadi manusia yang bermanfaat didunia dan diakhirat.*

*Terima kasih ku ucapkan kepada sahabat – sahabat dekat saya **Zakaria S.A.N, Bima Anggara S.A.N, Miza Jazuli S.A.N** yang telah membantu dan menemani saya semasa perkuliahan dan sampai sekarang ini dan juga teman-teman Adm Negara seangkatan yang selama ini telah bersedia mendampingiku sehingga mampu menyelesaikan karya skripsi ini. Terimakasih kepada senior dan junior ku di **HIMADISTRA** yang tiada henti memberikan dukungannya.*

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. Karya ini ku persembahkan untuk kalian orang-orang baik yang pernah hadir dihidupku.

Alhamdulillah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada hambaNya. Atas perkenaanNya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini, bukti dari perjuangan yang panjang dan jawaban atas doa dan senantiasa mengalir dari orang orang terkasih. Sholawat serta salam juga peneliti sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sang pejuang sejati yang telah membawa kita ke zaman yang berahklak dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini dengan judul **“Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Tingkat Penganguran di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Aceh Barat)”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara di Universitas Teuku Umar .

Penulis menyadari bahwa mulai dari awal hingga akhir proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang mudah tanpa bantuan dan dorongan dari pihak yang terkait secara langsungmaupun tidak langsung, terutama dan teristimewa. Kepada Almarhum ayah Teuku Tung, Almarhum Ibu Cut Zainab dan Kakak Cut Hartati yang senantiasa memberikan rasa sayang didikan, materi serta doa yang selalu dipanjatkan Pada Allah SWT kepada penulis. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Zuhrizal Fadhly. S.E, M.Si selaku pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE, MBA selaku rektor Universitas Teuku Umar Meulaboh.
2. Bapak Basri, S.H, M.H Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar.
3. Ibu Safrida, S.Sos. M.A.P selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar.
4. Bapak Zuhrizal Fadhly, S.E M.si Selaku Dosen Pembimbing skripsi Universitas Teuku Umar.
5. Bapak Fadhil Ilhamsyah M.si dan Bapak Najamuddin M.si selaku dosen penguji skripsi Universitas Teuku Umar.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi Kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, Semoga Karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Meulaboh, 24 Juni 2022

Penulis

ABSTRAK

This thesis is entitled "**The Role of Government in Reducing the Level of Unemployment in West Aceh Regency (Case Study: West Aceh Manpower and Transmigration Office)**". This thesis aims to find out the role of local government in alleviating unemployment in West Aceh Regency, to find out also the obstacles faced by the local government in alleviating unemployment and to find out how the efforts of the Manpower and Transmigration Office in overcoming unemployment problems. This thesis uses an empirical juridical approach and descriptive qualitative research type with data collection obtained through interviews, observation and documentation. First, the role of the Manpower and Transmigration Office in reducing the level of unemployment in West Aceh Regency, by helping to provide insight, knowledge and guidance to small business actors, and conducting various technical training programs. Second, the obstacles faced by the Manpower and Transmigration Office in reducing the unemployment rate in West Aceh Regency are the lack of available infrastructure and limited human resources. Third, the government's efforts in overcoming unemployment problems in West Aceh through the Manpower and Transmigration Social Service are by increasing labor capital mobility and with various workforce training programs.

Keywords: Role, Government, Unemployment.

Skripsi ini berjudul “**Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat)**”. Skripsi ini bertujuan ingin mengetahui peran pemerintah daerah dalam mengentaskan pengangguran di Kabupaten Aceh Barat, ingin mengetahui juga kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengentaskan pengangguran dan ingin mengetahui bagaimana upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengatasi permasalahan pengangguran. Skripsi ini menggunakan pendekatan *juridis empiris* dan jenis penelitian kualitatif *deskriptif* dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara , observasi dan dokumentasi. Pertama, peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat, dengan membantu memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan bimbingan kepada pelaku usaha kecil, dan melakukan berbagai program pelatihan teknis. Kedua, kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat adalah masih minimnya Infrastruktur yang tersedia dan masih terbatasnya SDM yang dimiliki. Ketiga Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran di Aceh Barat melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu dengan meningkatkan mobalitas modal tenaga kerja dan dengan berbagai program pelatihan tenaga kerja.

Keywords: **Peran, Pemerintah, Pengangguran.**

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sitematika Penelitian	6
Bab II: Tinjauan Pustaka	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori.....	8
2.3 Tinjauan Peran	8
2.4 Tinjauan Peran Pemerintah	11
2.5 Tinjauan Penganguran.....	19
2.6 Tinjauan Tenaga Kerja.....	20
Bab III: Metodologi Penelitian	23
3.1 Metode Penelitian	23
3.2 Lokasi Penelitian.....	24
3.3 Sumber Data.....	24
3.4 Tehnik Pengumpulan Data.....	25
3.5 Teknik Penentuan Narasumber	21
3.6 Analisi Data.....	26
3.7 Uji kredibilitas Data.....	27
3.8 Jadwal Penilitan	29
BAB IV: HASIL PENELITIAN	30
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
4.1.1 Kondisi Geografi Wilayah Penelitian	30
4.1.2 Susunan Organisasi	32

4.1.3 Visi dan Misi.....	33
4.2 Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.....	35
4.2.1 Peran sebagai stabilisator.....	35
4.2.2 Peran Sebagai Inovator	38
4.2.3 Peran Sebagai Motivator.....	39
4.3 Upaya Yang dilakukan oleh pemerintah daerah	41
BAB V: PEMBAHASAN.....	46
5.1 Peran Pemerintah Daerah sebagai stabilisator	46
5.2 Peran Sebagai Inovator	47
5.3 Peran Sebagai Motivator.....	47
5.4 Upaya yang dilakukan oleh pemnrintah daerah.....	48
BAB VI: PENUTUP DAN KESIMPULAN.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran Saran.....	50
Daftar Pustaka.....	52
Lampiran	54

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Peneltian.....	24
Tabel 4.1 Informasi Program Pelatihan	44
Tabel 4.2 Informasi Pencari Kerja	45

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi
- Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 4. Surat Telah Penelitian
- Lampiran 5. Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang cukup rumit yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat. Kelangkaan lapangan kerja ini disebabkan karena tidak seimbangnya antara kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan jumlah para pencari kerja yang terus bertambah tiap tahun. Selain itu, kurangnya minat masyarakat dalam hal berwirausaha juga ikut menyebabkan semakin tingginya angka pencari kerja.

Pengangguran juga terjadi karena lapangan kerja yang ada terkadang memerlukan skills khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh pencari kerja. Kalaupun ada jumlahnya sangat terbatas, Misalnya kemampuan berbicara bahasa Inggris, kemampuan mengoperasikan komputer dan pengetahuan aktuaria. Keadaan yang demikian menyebabkan jumlah pengangguran tetap tinggi karena tidak adanya titik temu antara pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia (Sudrajad,2008).

Serapan tenaga kerja terbesar di Aceh Barat adalah pada sektor pertanian, Perkebunan, Industri pertambangan dan nelayan. Angka pengangguran di Aceh Barat masih dikatakan cukup tinggi. Berdasarkan pendataan BPS Aceh Barat pada tahun 2021, Dari 95.567 angkatan kerja berumur 15 tahun ke atas, terdapat 88 790 orang yang bekerja, 6.777 orang pengangguran, 14.586 sekolah, 38.831

mengurus rumah tangga dan 10.174 lainnya tidak termasuk dalam ke empat kategori sebelumnya.

Masih berdasarkan pendataan BPS Aceh Barat sejak 2018, Jika dibandingkan dengan presentasi Tahun 2018 dan 2020, Maka jumlah TPT tahun 2019 yaitu dengan presentasi mencapai 7 persen, Tahun 2020 mencapai 6 persen dan Tahun 2018 mencapai 9 persen.

Seperti yang di kutip dari laman berita REPULIKA.CO.ID “ rata rata jumlah kartu pencari kerja yang dikeluarkan setiap hari paling sedikit mencapai 25 sampai 30 lembar setiap hari. Atau satu bulan bisa mencapai 700 hingga 800 lembar kartu pencari kerja”. Hal ini di sampaikan langsung oleh kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Aceh Barat, Thalea Naldy, Di Meulabouh, rabu (30/10/2020).

Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar di bandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia ini terus menunjukkan jurang (gap) yang terus membesar, Jika masalah pengangguran ini terus berlanjut di khawatirkan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karenanaikya angka pengangguran menyebabkan ekonomi menurun karena output yang dihasilkan tidak ada.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan keahlian kerja masyarakat Kabupaten Aceh Barat yang diharapkan mampu memfasilitasi program pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil, Demi menunjang tenaga kerja yang berkualitas. Agar terselenggaranya program pelatihan kerja yang baik dan bermutu pemerintah Kabupaten Aceh Barat wajib

menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Aceh Barat.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan mutu tenaga kerja di Aceh Barat merupakan salah satu tugas yang harus ditingkatkan agar masyarakat mempunyai keahlian dan ketrampilan yang mampu bersaing dengan daerah lain. Peran pemerintah dalam menyelenggarakan pelatihan kerja yang produktif juga ikut memperbaiki stabilitas perekonomian dan menurunkan angka kemiskinan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Stabilitas ekonomi daerah yang terganggu pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu karena rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat yang disebabkan karena enggan mengambil resiko, Rendahnya kemampuan dalam manajemenial bisnis dan kurangnya rasa percaya diri dalam memasarkan hasil dari produk mereka.

Berdasarkan uraian diatas, Pokok permasalahan yang akan menjadi permasalahan utama yaitu tingginya angka pengangguran itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, Pengangguran yang terjadi dikarenakan tidak seimbang antara pertumbuhan penduduk yang cenderung lebih besar dari pada pertumbuhan lapangan kerja, Akibatnya banyak tenaga kerja yang produktif tidak dapat ditampung oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

Rendahnya kualitas tenaga kerja juga menjadi faktor yang menyebabkan pengangguran. Mereka tidak bisa bersaing dengan orang yang memiliki ketrampilan tenaga kerja yang lebih baik, Selain itu permasalahan tenaga kerja juga

disebabkan karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan.

Mengacu pada permasalahan tersebut, Peneliti merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan mencari alternatif pemecahannya yang akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul :

“PERAN PEMERINTAH DALAM DALAM MENGURANGI TINGKAT PENGANGURAN DI KABUPATEN ACEH BARAT (Studi Kasus : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat Pada Bidang Pelatihan Dan Produktifitas Tenaga Kerja)”?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, Maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana peran pemerintah dalam mengurangi tingkat penganguran di Aceh Barat”?

1.3 Tujuan Penelitaan

Setiap bentuk langkah atau tindakan yang terencana telah mempunyai tujuan tertentu, demikian pula halnya dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui upaya pemerintah dalam megurangi tingkat penganguran di Aceh Barat (Studi kasus: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Pada Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Secara lebih mendalam dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara pada umumnya. Dan pada khususnya yang berkaitan sejauh mana upaya pemerintahan Aceh Barat dalam mengurangi tingkat pengangguran
2. Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat untuk peneliti untuk pengembangan kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang akan diperoleh selama perkuliahan pada program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Teuku Umar
2. Manfaat bagi pembaca, Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan saran yang berkaitan dengan topik yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi 6 bab, Sitematikanya adalah sebagai berikut :

- I. BAB I PENDAHULUAN : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
- II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Penelitan Terdahulu, dan Kerangka Teori.
- III. BAB III METODOLI PENELITIAN : Pada bab ini penulis memuat tentang metode dan jenis penelitian, Fokus penelitian, Lokasi penelitian, Jenis data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.
- IV. BAB IV HASIL PENELITIAN : Pada bab ini yang berisikan memuat tentang uraian laporan hasil penelitian yakni deskriptif dari interpretasi data data yang diperoleh.
- V. BAB V PEMBAHASAN : Pada bab ini memuat tentang uraian analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis sesuai hasil yang diperoleh dari lapangan
- VI. BAB VI PENUTUP : Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengangguran telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya ialah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Lestari pada Tahun 2010 dengan skripsi berjudul kebijakan pemerintah kota dalam mengatasi pengangguran (studi di kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jambi). Hasil Penelitian ini adalah pemerintah kota harus lebih ekstra dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga para pencari kerja dapat ditanggulangi oleh pemerintah kota, karena pengangguran berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nisar Tahun 2016 dengan judul strategi pemerintah dalam menanggulangi pengangguran (studi di kecamatan Soreang Kota Parepare). Hasil penelitian ini adalah pemerintah berhasil merealisasikan penanggulang angka pengangguran dalam persepektif ekonomi islam melalui program-program pemerintah sehingga angka rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 Tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani

meningkat sebesar 10,03 Tahun dan Pendapatan per kapita dalam beberapa tahun terakhir mengalami tren peningkatan.

Berdasarkan penelusuran tinjauan pustaka yang telah peneliti lakukan seperti skripsi dan jurnal diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu, sama-sama meneliti masalah peran pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Selanjutnya yang membedakan dengan penelitian saya adalah dimana penelitian saya berfokus Peran Pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Aceh Barat. sedangkan penelitian diatas membahas Strategi pemerintah dan kebijakan pemerintah dalam menekan pengangguran melalui program pelatihan kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Dinas Sosial. Maka dari itu peneliti berkeinginan untuk meneliti hal tersebut supaya bisa menambah wawasan keilmuan bagi masyarakat umum dan khususnya bagi peneliti sendiri.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan Peran

Teori-Teori di perlukan sebagai kerangka berpikir seorang peneliti untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan dipilih. Sarwono (2005), Dalam sebuah karya bukunya Teori-Teori psikologi social menuliskan bahwa “Peran merupakan serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu”

Dilihat dari sudut perilaku organisasi, Peran ini adalah salah satu komponen dari system social organisasi, Selain dari norma dan budaya organisasi. Sehingga strategi dan struktur organisasi juga terbukti ikut mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception*.

Jadi, Jika seorang individu atau sekelompok orang atau organisasi telah mengerjakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, Maka organisasi tersebut bisa dikatakan sudah melaksanakan peranan yang telah dibebankan kepadanya. Peran dan kedudukan(status) merupakan dual hal yang tidak mungkin dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, Jadi bisa dikatakan tidak ada kedudukan tanpa peranan dan tidak ada peranan tanpa kedudukan. Kedudukan (status) itu sendiri bisa diartikan sebagai tempat di kelompok sosial, Dimana ia ikut serta dalam berbagai pola kehidupan jika ia dipisahkan oleh individu yang memilikinya maka kedudukan hanyalah kumpulan hak dan kewajiban.

Horton dan Hunt dalam bukunya Sosiologi (1991), Mengungkapkan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Lebih lanjut lagi dikatakan:

Peran (role), Merupakan perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok yang mempunyai suatu status. Seseorang atau kelompok masyarakat memiliki status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut.

Dalam arti tertentu, peran dan status adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan hak-hak tersebut.

Kedudukan (status) dan peranan (role) merupakan unsur-unsur dalam lapisan masyarakat yang memiliki arti penting dalam sistem sosial. Soekanto dalam buku Sosiologi Keluarga (2004), Peranan adalah:

Peranan(role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Seseorang memiliki kedudukan (status) dan melaksanakan peranannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah diberikan atas kedudukan atau statusnya didalam suatu organisasi sehingga dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Soekanto (2004), peranan mungkin mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peran pada literatur perilaku organisasi menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat memengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku seseorang dalam menjalankan peran. Harapan akan peran tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut (Hutami & Chariri, 2011).

2.3 Tinjauan Peran Pemerintah

Siagian (2009), peran yang berkaitan dengan pemerintah sebagai berikut. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern.” Dari definisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan tingkat kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak akan pernah dicapai secara absolut.

Melaksanakan tugas pembangunan yang sangat penting dan mulia ini merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat dan bukan tugas pemerintah semata-mata. Akan tetapi meskipun demikian, harus diakui bahwa pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan

nasional. Peran yang disoroti berikut ini ialah selaku stabilisator, selaku inovator, selaku modernisator, selaku pelopor, dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Berikut penjelasannya

1) Peran pelaku stabilisator

Telah dicatat dimuka bahwa salah satu ciri negara-negara terbelakang dan sedang membangun ialah labilnya situasi politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Selain itu diakui bahwa dalam kondisi kehidupan kenegaraan dan masyarakat yang tidak stabil, sukar mengharapkan terselenggaranya berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, nalar yang sangat sederhana saja akan membenarkan pandangan bahwa salah satu peranyang sangat penting yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif ialah peran selaku stabilisator.

- a.** Stabilisator di bidang politik : peran pemerintah dalam bidang politik ialah menjamin bahwa dalam kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar. Rongrongan politik yang bersumber dari dalam negeri dalam berupa pertentangan yang tidak henti-hentinya antara berbagai kekuatan politik, apalagi kalau didasarkan pada perbedaan-perbedaan ideologi yang tajam. Bentuk lain dapat berupa timbulnya kekuatan oposisi yang hanya mementingkan partainya sendiri, meskipun hal itu dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat. Rongrongan yang bersumber dari dalam negeri dapat pula berupa keinginan dan tindakan

kelompok ekstrem tertentu yang ingin memaksakan kehendaknya dengan mengabaikan “peraturan permainan politik” yang telah disepakati bersama.

- b. Stabilitas ekonomi :** iklim yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara sedemikian rupa sehingga, ekonomi tumbuh secara wajar, suku bunga yang tidak tinggi, rendahnya inflasi, kesempatan berusaha makin luas, proses industrialisasi berlangsung dengan baik, kebijakan moneter dan fiskal yang menguntungkan bagi kepentingan nasional, dan lain sebagainya.

Tidak dapat disangkal bahwa kondisi perekonomian yang sering dihadapi oleh negara-negara terbelakang dan sedang membangun justru adalah kebalikan dari ciri-ciri di atas. Kelabilan ekonomi di negara-negara miskin dan sedang membangun seiring pula diperburuk oleh sikap dan tindakan negara-negara industri maju. Misalnya dengan memperlakukan negara-negara Dunia Ketiga itu sekadar sebagai sumber bahan mentah dan bahan baku yang sangat diperlukan oleh berbagai industri mereka sendiri. Walaupun mereka menanam modalnya di negara-negara miskin dan terbelakang, tidak sedikit masalah yang ditimbulkannya seperti repatsiasi keuntungan ke negara sendiri, tidak terjadinya alih pengetahuan dan teknologi, tenaga kerja lokal tidak ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya dan sistem imbalan yang digunakan bersifat diskriminatif dalam arti bahwa tenaga kerja yang berasal dari negara dimana indu

perusahaan didirikan dibayar lebih mahal ketimbang tenaga kerja lokal meskipun mempunyai tingkat pendidikan dan keahlian yang relatif sama.

Para pakar pengamat ekonomi sering menekankan bahwa ada paling sedikit lima hal yang menonjol mengapa stabilitas ekonomi sering terganggu di negara-negara miskin dan sedang membangun:

- 1) Jiwa kewirausahaan di kalangan warga negara tidak tinggi, situasi tersebut sering terlihat antara lain pada keengganan mengambil risiko, keengganan menyusun rencana jangka panjang, adanya persepsi bahwa “berdagang” bukanlah pekerjaan yang paling terhormat dibandingkan misalnya dengan menjadi seorang birokrat.
- 2) Keterampilan atau kemahiran manajerial di bidang bisnis rendah, yang sesungguhnya merupakan “produk sampingan”.
- 3) Produktivitas tenaga kerja yang rendah, bukan hanya keterampilan operasional yang kurang, akan tetapi juga etos kerja yang tidak tepat, ketidakdisiplinan mengenai waktu, ketidakcermatan melaksanakan tugas dan loyalitas yang tinggi kepada diri sendiri tetapi tidak kepada organisasi.
- 4) Keturunan para pendatang yang bermigrasi beberapa generasi yang lalu yang memiliki jiwa wirausahaan, memiliki modal, memiliki keterampilan manajerial dan mampu bekerja keras sehingga meskipun jumlah mereka tidak besar dan bahkan tergolong sebagai minoritas sering menguasai sebagian besar perekonomian nasional.

c. Stabilitas sosial budaya : menjadikan negara bangsa menjadi masyarakat masyarakat dan modern, tanpa kehilangan jati dirinya. Dengan perkataan lain, budaya bangsa harus sedemikian kuat sehingga dapat dijadikan pedoman perilaku positif dan sebagai perekat guna menjamin stabilitas sosial, akan tetapi tidak sedemikian kuatnya sehingga aspek-aspek yang sudah nyata-nyata menjadi penghalang bagi perubahan tidak bisa diubah. Peran pemerintah selaku stabilisator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan persuasif, pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan, tidak perlu dengan “loncatan jauh ke depan”.

2) Peran Selaku Inovator

Dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru yang dikemukakan di atas.

Di samping keabsahan, ada 3 hal faktor lain yang mutlak perlu mendapatkan perhatian serius.

a. Menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu. Telah umum diketahui bahwa salah satu “tuduhan” yang

dilemparkan oleh masyarakat kepada aparaturnya pemerintah pada umumnya ialah cara bekerja yang lamban, sistem kerja yang berbelit-belit, dan cara berfikir yang berdasarkan pada orientasi kekuasaan. Hasilnya ialah tingkat produktivitas kerja yang rendah. Inovasi akan dapat merubah semua itu karena aparaturnya mampu bekerja dengan cepat tetapi aman, sistem kerja yang sederhana dan transparan dan cara berfikir yang didasarkan pada pelayanan. Jika pemerintah mampu mewujudkan birokrasi yang demikian, cara-cara berinovasi yang ditawarkan kepada masyarakat akan lebih mudah diterima.

- b. Inovasi yang sifatnya konseptual. Pemerintah dengan seluruh jajarannya harus merupakan sumber dari ide-ide baru. Suatu hal yang menonjol dalam kaitan ini menyangkut apa yang secara tradisional dalam administrasi negara dikenal sebagai “netralitas” birokrasi. Dengan pandangan demikian, birokrasi sering menempatkan diri semata-mata sebagai pelaksana keputusan politik yang di ambil oleh institusi yang berhak dan mempunyai wewenang untuk mengambalnya tanpa mempersoalkan, apalagi menganalisis, apakah keputusan politik itu demi kepentingan rakyat banyak atau tidak.
- c. Inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Bukanlah merupakan suatu keanehan untuk melihat aparaturnya pemerintah yang bekerja berdasarkan pendekatan legalistik. Dalam praktek, dua hal sering terlihat sebagai perwujudannya, yaitu pendekatan dalam penyelesaian masalah dan sikap.

Prosedur dan metode kerja, serta pendekatan yang diperlukan adalah yang bersifat “*problem-solving*” dan “*action-oriented*”. Yang dimaksud dengan pendekatan demikian ialah kesediaan meneliti dan melakukan diagnosis mengapa permasalahan timbul untuk kemudian dicari jalan keluarnya dengan menggunakan rasio dan pendekatan yang bersifat ilmiah sehingga “terapi” yang digunakan tidak hanya mampu “mengobati” gejala-gejala yang timbul, akan tetapi menghilangkan faktor-faktor penyebab hingga ke akarnya

3) Peran Sebagai Motivator

Menurut supriyono (2003) motivator adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu sedangkan motif adalah kebutuhan keinginan, dorongan untuk berbuat sesuatu. Hal ini dikarenakan motivasi seseorang dipengaruhi oleh stimuli kekuatan dan instrinsik yang ada pada individu bersangkutan, stimuli eksternal mungkin dapat pula mempengaruhi motivasi tetapi motivasi itu sendiri mencerminkan reaksi individu terhadap stimuli tersebut. Motivasi merupakan hasil dari sebuah proses yang bersifat internal dan eksternal yang membangkitkan untuk bertindak, mendorong untuk mencapai tujuan tertentu dan membuat tetap tertarik dengan tujuan tertentu. Dengan demikian seorang motivator adalah mereka yang mampu membangkitkan orang lain untuk bertindak dan mencapai tujuan tertentu.

Terkait dengan peran pemerintah daerah sebagai motivator artinya adalah mampu menggerakkan masyarakat jika dalam proses sebuah kegiatan terjadi

kendala-kendala dalam proses pengentasan pengangguran. Pemerintah daerah berperan melalui pembuatan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Program yang sesuai aspirasi masyarakat akan menumbuhkan minat baru bagi masyarakat dalam program pengentasan pengangguran yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah selalu memberikan dorongan ke masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan nasional

2.4 Tinjauan Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno,1994). Angka pengangguran adalah presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan tapi tidak mempunyai pekerjaan disebut penganggur (Sumarsono, 2009).

Menurut Sukirno (2000), dalam suatu perekonomian modern pengangguran dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagaiberikut.

1. Pengangguran Normal

Pengangguran yang disebabkan oleh keinginan para pekerja untuk mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai untuk mereka.

2. Pengangguran Struktural

Perkembangan suatu perekonomian akan menimbulkan perubahan-perubahan yang tidak selalu baik akibatnya kepada penggunaan tenaga kerja.

3. Pengangguran Konjungtur

Pengangguran yang disebabkan oleh kemerosotan kegiatan ekonomi dinamakan pengangguran konjungtur. Kemerosotan kegiatan ekonomi menyebabkan pengangguran konjungtur biasanya berlaku sebagai akibat kemerosotan dalam pengeluaran atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian tersebut.

2.5 Tinjauan Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab I ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan dalam kamus bahasa besar Indonesia tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja.

Menurut Sedarmayanti (2008), Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja (15 tahun ke atas) atau 15-64 tahun, atau penduduk yang secara potensial dapat bekerja. Dengan perkataan lain tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada

permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut, Tenaga kerja terdiri dari:

- 1) Angkatan kerja (*labour force*) adalah penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja tetapi siap untuk mencari kerja.
- 2) Bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, ibu rumah tangga, dan para penyandang cacat, serta lanjut usia.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep – 224/Men/2003 yang mengatur undang-undang ketenagakerjaan, antara lain :

- a. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa deskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”
- b. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditentukan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa deskriminasi dari pengusaha.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Kata kualitatif mengisyaratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti (Juliansyah, 2011).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan diarahkan pada latar belakang objek dan individu tersebut secara utuh (Moleong, 2006).

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Moch Nazir bahwa metode deskriptif adalah mempelajari masalah-masalah dalam

masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, dan pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 2003).

3.2 Sumber Data

Sumber Data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder (Purhantara, 2010).

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung terdiri atas: buku-buku, undang-undang, artikel, majalah, ensiklopedi, kamus, data dokumentasi dan arsip-arsip resmi lainnya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan peneliti. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat sangat penting. Pada umumnya, data yang dikumpulkan akan digunakan kecuali, untuk keperluan eksploratif, juga untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Moehar, 2002).

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subyek penelitian.

2. Observasi

Observasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang di teliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik non interaksi yang dilakukan oleh si peneliti agar data yang diperoleh semakin kuat.

3.4 Teknik Penentuan Narasumber

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan narasumber adalah yang dianggap mempunyai informasi (*key-informan*) yang dibutuhkan di wilayah peneliti ini. Cara yang digunakan untuk menentukan narasumber tersebut maka penulis menggunakan "*purposive sampling*", yaitu teknik sampling yang digunakan oleh

peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan narasumber(Arikunto, 2009).

Tabel 3.1 : Daftar informan

NO	Narasumber	Jabatan
1	Muhammad Nasir, SP.d	Kabid Tenaga Kerja Aceh Barat
2	Edy Sofian, S.E,M.Si	Kabid Transmigrasi Aceh Barat
3	Khairil Indra	Kasi Pelatihan Aceh Barat

3.5 Analisa Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terjadi

secara bersamaan berarti reduksi data , penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Silalahi, 2009).

3.6 Uji Kredibilitas Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. “Validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek peneliti dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti.

Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sungguh terjadi pada obyek penelitian”, (Sugiyono, 2008). Pengembangan validitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulas Triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. (Sugiyono, 2008) Triangulasi dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain. Menggali satu sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan menentukan waktu yang berbeda (tepat).

Triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. (Sugiyono, 2008) Triangulasi dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut:

4. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
5. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
6. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain. Menggali satu sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan menentukan waktu yang berbeda (tepat).

3.7 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Kaway XVI, Dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Penelitian ini direncanakan selama 6 bulan, dengan melalui tiga tahapan yaitu : Persiapan, Pelaksanaan Penelitian dan Penyusunan Hasil.

Tabel 3.2 jadwal rencana penelitian

	TAHAP KEGIATAN	WAKTU						
		Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Feb 2022	Mar 2022	Mei 2022
1	PERSIAPAN a. Penyusunan Proposal	■						
	b. Seminar							
2	Pelaksanaan Penelitian a. Observasi				■			
	b. Penyiapan pedoman wawancara				■			
	c. Wawancara				■			

	d. Pengumpulan data					
3	Penyusunan Hasil					
	a. Konsul					
	b. Seminar Hasil					
	c. Konsul					
	d. Sidang					

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat selatan pulau Sumatera. Kabupaten Aceh Barat sendiri mempunyai luas wilayah sebesar 10.097.04 km atau 1.010.466 ha, dimana bagian wilayah pantai barat dan selatan membentang dari barat ke timur mulai dari kaki gunung Gurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Semayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 km pada masa sebelum dimekarkan. Namun setelah dimekarkan luas wilayah menjadi 2.927,95 Km. Kabupaten Aceh Barat saat ini memiliki 12 kecamatan 322 desa dan jumlah penduduk sebanyak 210.113 jiwa, kemudian kota Meulaboh merupakan kota yang menjadi ibu kota Kabupaten Aceh Barat dimana pekerjaan dimana pekerjaan sebagian penduduknya mencerminkan kehidupan perkotaan yaitu mayoritasnya adalah perdagangan dan jasa.

4.1.1 Kondisi Geografi Wilayah Penelitian

Alamat Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi terletak di jalan ujung Beurasok, Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Memiliki sertifikat hak pakai nomor 5. Nama pemegang hak yaitu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Bangunan ini merupakan barang milik daerah dan merupakan aset pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Lokasi objek penelitian

berjarak 4 kilometer dari pusat kota Meulaboh, dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat sekaligus dengan akses jalan desa.

Memiliki gedung Bangunan yaitu berupa bangunan kantor dinas, bangunan mushalla, bangunan tempat wudhu, bangunan aula, 3 bangunan UPTD BLK(balai latihan kerja), 1 tempat parkir, 2 bangunan gedung, bangunan ruang makan asrama, 1 bangunan rumah dinas, 2 bangunan rumah dinas, 3 bangunan rumah dinas, 4 bangunan rumah dinas, 5 bangunan rumah dinas, 1 bangunan kantor bidang sosial, dengan luas tanah 20.006,25 m² dan luas bangunan (total) 4.839,75 m².

Sebelah Utara : Jalan Desa.
Sebelah Selatan : Tanah Penduduk.
Sebelah Timur : Tanah Penduduk.
Sebelah Barat : Tanah Penduduk.

Fasilitas Umum yang tersedia di lingkungan objek penelitian adalah sebagai berikut:

Listrik : Ada (perusahaan Listrik Negara).
Jaringan Telepon : Ada.
Sumber Air Bersih : Sumur Bor, PAMD.
Rumah Ibadah : Musholla, Mesjid.
Sarana Kesehatan : Puskesmas.
Sarana Pendidikan : SD, SMP, SMA.
Sarana Rekreasi : Tidak Ada.

4.1.2 Susunan Organisasi

1. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Program dan Pelaporan
- d. Bidang Tenaga Kerja
- e. Bidang Transmigrasi

2. Sekretariat Membawahkan

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Program dan Pelaporan Membawahkan:

- a. Seksi Penyusunan Program
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- c. Seksi Data Dan Informasi

4. Bidang Tenaga Kerja Membawahkan:

- a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Seksi Hubungan Industrial dan Jamsos Naker

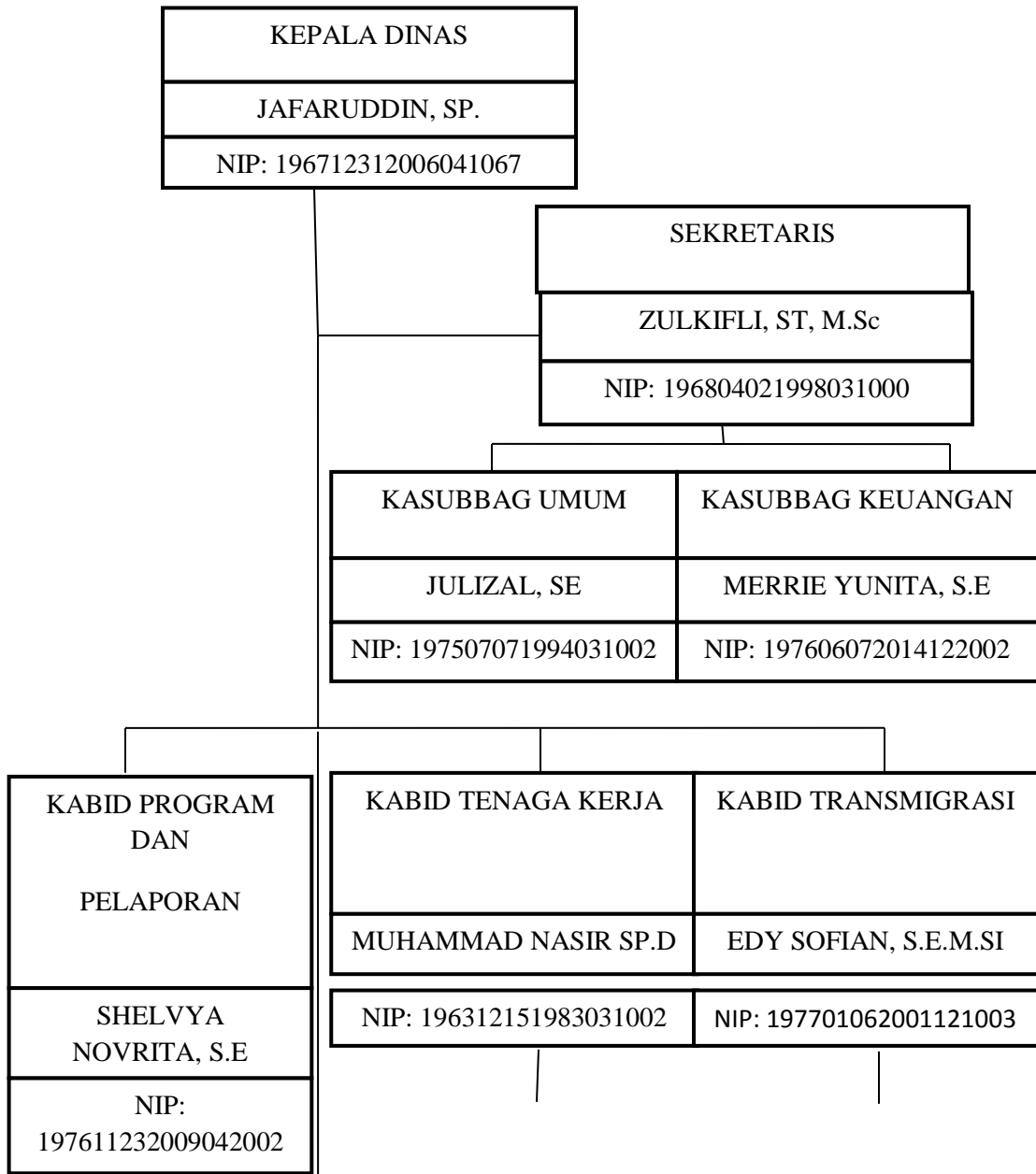
5. Bidang Transmigrasi Membawahkan:

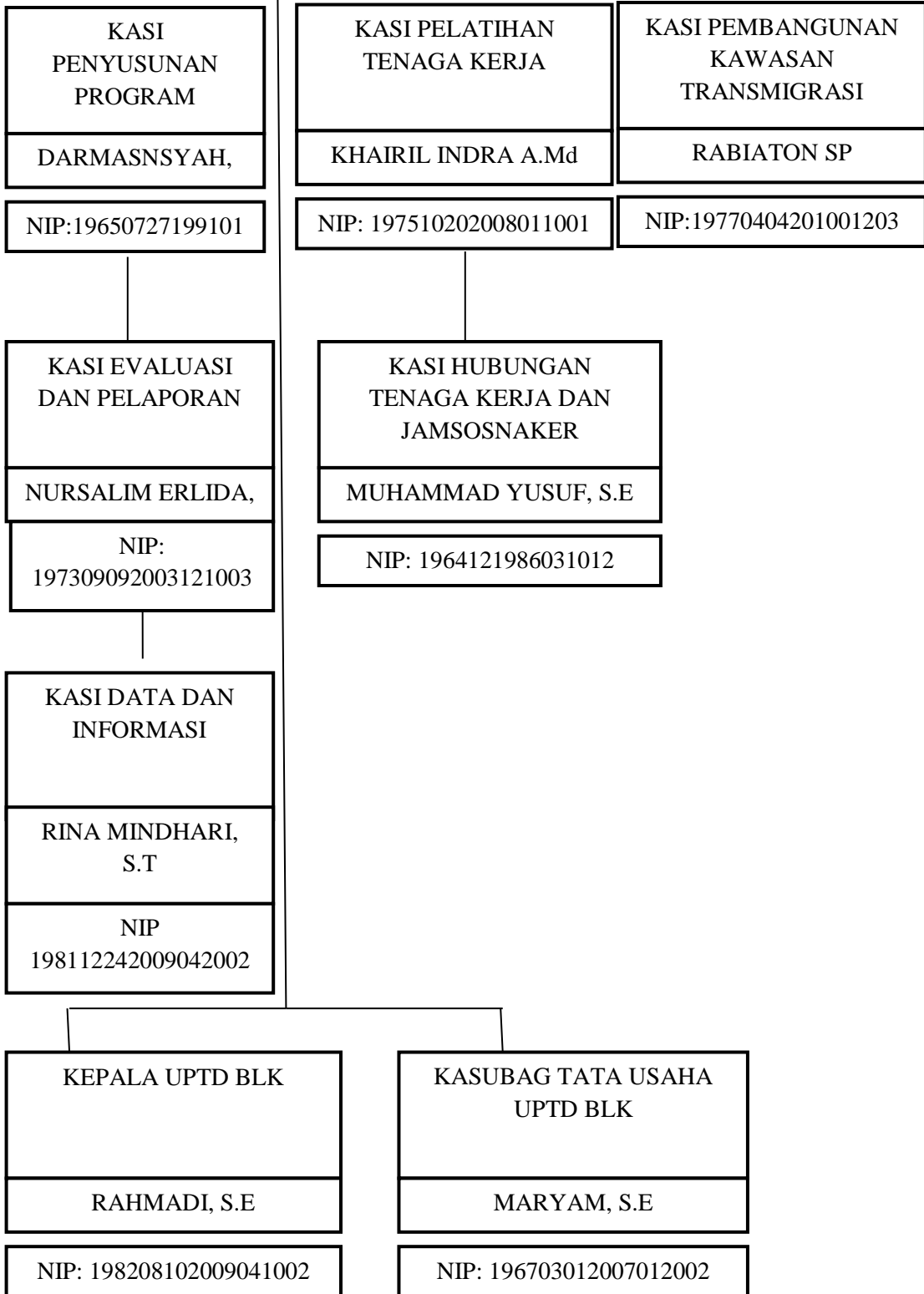
a. Seksi Pembangunan Kawasan Dan Transmigrasi

6. UPTD

a. Kasubbag Tata Usaha UPTD BLK

Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:





4.1.3 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Aceh Barat

Visi

Terwujudnya tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang produktif maju, mandiri dan sejahtera.

MISI

- a. Menciptakan Tenaga kerja terampil produktif dan mempunyai kompetensi kerja.
- b. Meningkatkan hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja.
- c. Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) transmigrasi dan penyebaran perpindahan penduduk yang seimbang antar kabupaten/kota.
- e. Mengembangkan Kapasitas masyarakat dan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.
- f. Mengembangkan Desa transmigrasi produktif menuju desa yang maju dan mandiri.

4.2 Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat

4.2.1 Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sebagai stabilisator

Dalam kehidupan social pengangguran sangat berpotensi menimbulkan berbagai tindakan kriminal, gejala social politik dan kemiskinan. Selain itu pengangguran juga merupakan beban masyarakat dalam hal pemborosan konsumsi bahan pokok seperti beras, minyak, air, gula, pakaian dan sebagainya setiap hari tanpa melakukan kegiatan yang berpenghasilan.

Oleh karena kondisi itu, pemerintah Indonesia melalui pemerintah daerah harus bisa menjadi stabilisator dan melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah terkait isu pengangguran. Setiap warga Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang layak dalam keseharian hal ini sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 27 ayat 2 “tiap tiap warga Indonesia berhak atas penghidupan yang layak, maka pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja dan melindungi hak hak tenaga kerja”

Pengangguran adalah sebuah kondisi dimana seseorang tidak mempunyai penghasilan dalam usia produktif antara 15 hingga 65 tahun, adapun pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan sebagaimana ditetapkan dalam undang undang No. 13 Tahun 2003 pasal 4 yang bertujuan untuk :

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Muhammad Nasir Sp.d sebagai Kepala Bidang Tenaga Kerja terkait dengan peran pemerintah daerah sebagai *stabilisator* dalam mengatasi pengangguran menyampaikan sebagai berikut :

“Untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Aceh Barat Peran Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi sebagai stabilisator adalah terus mengupayakan agar setiap pekerja maupun pencari kerja bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan layak dengan kemampuan yang mereka miliki dan kami juga membantu memberikan perlindungan hukum ke semua pekerja di Aceh Barat agar semua hak-hak mereka sebagai pekerja bisa terpenuhi. lalu kami juga memberikan bantuan wawasan dan pelatihan teknis kepada pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat mandiri dan lebih andal, selain itu Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi juga membuka berbagai pelatihan tenaga kerja yang dilakukan di BLK, hal ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan serta ketrampilan khusus, agar para pencari kerja lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan maupun membuka usaha sendiri. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan di Aceh Barat untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan, dan kami juga terus melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan di kawasan tertinggal dan melakukan pendataan agar mereka (pencari kerja) dapat mendapatkan perhatian secara khusus, sehingga dengan demikian saat hak hak masyarakat bisa terpenuhi, diharapkan mampu menciptakan stabilisasi baik di bidang ekonomi, politik maupun budaya ”.(Wawancara, 08 Februari 2022)”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Aceh sudah sangat baik, selain memberikan pelatihan teknis secara langsung pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga ikut memberikan solusi,wawasan, informasi dan pengarahan langsung terhadap para pencari kerja.

Selain itu yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran adalah harus membuat langkah langkah kebijakan dan berbagai program lainnya untuk meningkatkan kesempatan kerja diantaranya:

1. Mengembangkan potensi masyarakat dibidang kelautan, pertanian, dan perkebunan, karena sebagian besar geografis di Aceh Barat adalah Laut, sawah dan hutan yang sangat luas. Jika ini bisa dikelola secara baik dan professional maka bisa menciptakan lapangan kerja yang produktif.
2. Segera melakukan penyerdehanaan perizinan pelaku usaha sehingga bisa menarik lebih banyak penanam modal baik dari dalam daerah maupun luar daerah sehingga bisa merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
3. Melancarkan system transmigrasi dan mengalokasikan penduduk padat ke daerah jarang penduduk dengan memfasiltasi mereka di bidang pertanian, perkebunan, dan perternakan sehingga pembangunan lebih merata.
4. Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Aceh dengan melakukan promosi promosi ke daerah luar untuk menarik minat wisatawan luar daerah sehingga perputaran ekonomi yang terjadi lebih besar.

5. Melakukan sinergi kerjasama antar Badan Usaha Milik Neagara maupun milik Swasta yang memiliki keterkaitan pekerjaan sehingga bisa meningkatkan lapangan pekerjaan baru.

4.2.2 Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sebagai Inovator

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Muhammad Nasir Sp.d sebagai Kepala Bidang Tenaga Kerja terkait dengan peran pemerintah daerah sebagai *Inovator* dalam mengatasi pengangguran menyampaikan sebagai berikut :

“ Secara Umum peran kami sebagai inovator yakni menyusun berbagai program pemberdayaan dan pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat langsung. Sehingga dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan bisa terus menjadi perangsang bagi masyarakat untuk bekerja maupun membuka usahanya sendiri dan kami juga menyediakan berbagai informasi lowongan pekerjaan yang tersedia di wilayah di Aceh Barat ”.(wawancara,08 februari 2022)

Tanggapan senada berkaitan hal tersebut diatas juga turut disampaikan oleh Khairul Indra selaku kasi pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat bahwa terkait dengan pemerintah daerah sebagai inovator dalam pembuatan perubahan dan menyiapkan penanggulangan pengangguran di Aceh Barat, Khairul Indra mengatakan sebagai berikut :

“ Peran inovator yang selama ini diterapkan oleh pemerintah daerah didalam upaya upaya menanggulangi pengangguran adalah membuat program-program yang sifatnya meminimalkan permasalahan pengangguran, beberapa program diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat dan berbagai program pelatihan yang dilaksanakan langsung di BLK Aceh barat”.(wawancara, 08 februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan oleh para informan diatas menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebagai inovator dalam pembuatan perubahan dan menyiapkan penanggulangan pengangguran sudah dilaksanaka

dengan cukup baik yaitu dengan berbagai program pemberdayaan, pelatihan dan penyediaan informasi lowongan pekerjaan di Aceh Barat.

4.2.3 Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sebagai Motivator

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan peran pemerintah daerah sebagai motivator dalam menggerakkan masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pengentasan pengangguran di Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini Muhammad Nasir S.Pd mengatakan sebagai berikut:

“Sejauh ini kendala yang kami hadapi dalam mengatasi masalah pengangguran masih cukup banyak, baik itu masalah yang timbul karena faktor internal maupun masalah karena faktor eksternal. Mungkin ada beberapa point faktor kendalanya yang bisa saya sampaikan secara spesifik diantaranya adalah Masih kurangnya Sarana dan prasarana yang tersedia membuat terbatasnya pelaksanaan program yang kami dilaksanakan, Kemudian Kurangnya lapangan kerja yang tersedia pada aspek akomodatif seperti perusahaan, pabrik, market dan lain lain juga mempengaruhi penempatan para pencari kerja, lalu Dampak pandemi covid 19 yang terjadi pada tahun 2019 yang menyebabkan banyak perusahaan dan UMKM terganggu masa produksinya sehingga banyak tenaga kerja yang dirumahkan atau di PHK, Masih kurangnya minat generasi muda untuk bekerja dibidang kelautan, pertanian, dan perkebunan juga sangat mempengaruhi terjadinya pengangguran dan kemudian kurangnya produktivitas masyarakat dalam mengembangkan UMKM sehingga terus membludaknya para pencari kerja di masyarakat ”. (Wawancara, 08 Februari 2022)

Dalam wawancara selanjutnya yang penulis lakukan kepada kepada Edi Sofian, S.E., M.Si berkaitan dengan masalah peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat sebagai motivator dalam upaya menggerakkan masyarakat dalam pengentasan pengangguran di Aceh Barat, diperoleh informasi sebagai berikut:

“ Kendala yang sering kami hadapi untuk menggerakkan masyarakat itu masih cukup banyak diantaranya adalah kurangnya dan minimnya kemampuan dan

pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat membuat serapan tenaga kerja yang tidak terpenuhi dengan maksimal, Maka dari itu motivasi dari kami hanya sebatas memberikan dorongan mental berupa wawasan dan pengetahuan dasar tentang dunia kerja, selebihnya itu kami kembalikan ke individu masing masing para pencari kerja”(wawancara, 08 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan penelitian diatas dapat diketahui bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat sebagai motivator dalam membuat perubahan dan penanggulangan pengangguran sudah dilakukan dengan cukup optimal, dikarenakan pemerintah daerah sudah melakukan berbagai motivasi yang bersifat dorongan mental , berupa wawasan dan penyampaian pengetahuan dasar bagaimana gambaran tentang dunia kerja.

4.3 Upaya Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Menanggulangi Angka Pengangguran Di Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang sosial dan ekonomi, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi telah melakukan berbagai cara dan upaya untuk menekan angka pengangguran. Selain itu, Pemerintah pusat juga terus melakukan berbagai inovasi kebijakan demi terciptanya lapangan pekerjaan yang baru, sesuai inpres No. 7/2019 Tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Paket kebijakan tersebut diharapkan akan lebih efektif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di masa pemulihan pandemi ini.

Adapun upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi pengangguran yakni:

a. Meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja yang kompeten

Mobilitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam studi ekonomi karena melihat bagaimana tenaga kerja, sebagai salah satu faktor utama produksi, dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi. Ada dua jenis utama mobilitas tenaga kerja: geografis dan pekerjaan. Mobilitas geografis mengacu pada kemampuan pekerja untuk bekerja di lokasi tertentu, sedangkan mobilitas pekerjaan mengacu pada kemampuan pekerja untuk mengubah jenis pekerjaan. Meningkatkan dan mempertahankan mobilitas tenaga kerja tingkat tinggi memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Mobilitas tenaga kerja telah terbukti menjadi pendorong kuat inovasi. Berikut hasil wawancara kepada Edy Sofian, S.E,M.Si sebagai Kepala Bidang Transmigrasi mengatakan bahwa:

“Peningkatan mobilitas modal dilakukan dengan memindahkan industry (padat karya) ke wilayah yang mengalami masalah pengangguran parah, Sehingga terjadinya pemerataan penduduk. Selain itu Peningkatan mobilitas tenaga kerja dengan cara dilakukan dengan memindahkan pekerja ke kesempatan kerja yang lowong dan melatih ulang keterampilannya sehingga dapat memenuhi tuntutan kualifikasi di tempat baru. Peningkatan mobilitas modal dilakukan dengan memindahkan industry (padat karya) ke wilayah yang mengalami masalah pengangguran parah. Selain itu dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan perkembangan era revolusi industri 4.0 yang kian pesat, kita dituntut untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten dalam berbagai sektor agar bisa bersaing dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam dunia kerja” .(Wawancara, 08 Februari 2022)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerataan penduduk sangat penting dilakukan demi mengurangi gap yang terjadi antara pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang tersedia. Selain itu dengan Seiring dengan terus berkembangnya era globalisasi, masyarakat harus siap menghadapi berbagai kemajuan teknologi yang tumbuh begitu pesat, terutama pertumbuhan teknologi dalam dunia kerja. Oleh karena itu ini adalah salah satu tugas pemerintah daerah yang harus bisa membina dan menyediakan berbagai fasilitas yang memadai demi terciptanya tenaga kerja yang terampil dan kompeten di masyarakat.

b. Mengadakan berbagai program pelatihan kerja

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat melalui Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) dan Program Penyelenggaraan Padat Karya Produktif. Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah Daerah Aceh Barat telah berupaya membuat atau menciptakan pola-pola perluasan kesempatan kerja, salah satunya dibidang kewirausahaan mandiri yaitu penciptaan kewirausahaan baru dan pelatihan-pelatihan guna untuk menumbuh kembangkan kemampuan yang dimiliki

Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.

Sesuai dengan amanat Undang undang, pemerintah daerah sudah banyak melakukan berbagai program pelatihan, Berdasarkan informasi yang disampaikan Oleh Bapak Muhammad Nasir Sp.d sebagai Kepala Bidang Tenaga Kerja menyampaikan bahwa program pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Aceh Barat ialah:

1. Pelatihan komputer
2. Menjahit pakaian dengan mesin
3. Pengelasan Plate Werder SMAW 2G
4. Pemasangan listrik bangunan sederhana
5. Pembuatan desain grafis muda
6. Service sepeda motor sistem Konvensional

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairil Indra A.md menyampaikan bahwa :

“ Dari berbagai program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Aceh Barat diharapkan agar mampu membuat peserta agar lebih terampil, berpengalaman, berpengetahuan dan merangsang keinginan agar mampu untuk berwirausaha, sehingga ini setidaknya mampu untuk menekan angka pengangguran di Aceh Barat. Selain itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat juga melakukan pemantauan dan monitoring terhadap usaha yang dikembangkan oleh peserta, ini dilakukan jika ada masalah yang terjadi maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bisa ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut” .(Wawancara 08, Februari 2022)

Dari hasil wawancara diatas bisa kita simpulkan bahwa dengan adanya pelatihan tenaga kerja, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berharap setelah pelatihan selesai para peserta bisa menerapkan ilmu yang sudah didapatkan bisa langsung di implementasikan ke kehidupannya sehari hari dan

bisa mengembangkan usahanya sendiri. Sehingga bisa menciptakan lebih banyak peluang kerja baik untuk dirinya maupun untuk orang lain pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 4.1 : Informasi pelatihan kerja yang diprogramkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Aceh Barat Tahun 2021

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta		Jumlah Pertemuan
		L	P	
1	Pelatihan Komputer	9	7	30 Hari
2	Menjahit	7	25	30 Hari
3	Pemasangan listrik	14	2	30 Hari
4	Pengelasan	16	-	30 hari
5	Design grafis	10	6	30 Hari
6	Service Sepeda Motor	15	1	30 Hari

Dari tabel diatas bisa penulis simpulkan program pelatihan kerja yang dilakukan di BLK Aceh Barat diikuti oleh ratusan peserta yang terbagi dalam beberapa kelas dan program keahlian masing masing, dengan pealtihan ini pemerintah daerah mengharapkan masyarakat bisa mendapatkan ilmu dan keahlian yang mampuni agar produktivitas di masyarakat bisa terus tumbuh dan naik demi terwujudnya pembangunan ekonomi yang merata.

Tabel 4.2 : Informasi pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat Tahun 2018 sampai tahun 2021

No	TAHUN	SISA PENCAKER TAHUN LALU		PENCAKER KYANG TERDAFTAR		PENEMPATAN KERJA YANG TERDAFTAR		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	
1	2018	5211	2647	239	292	97	77	531
2	2019	3095	1769	360	357	176	338	717
3	2020	1617	868	78	9	10	8	87
4	2021	1476	766	33	7	8	2	40

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat Tahun 2018-2021

Dari tabel diatas bisa penulis simpulkan jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja terus mengalami penurunan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Begitu pula dengan serapan tenaga kerja juga mengalami kemajuan yang signifikasi pada tahun 2018 dan 2019, tapi penempatan kerja yang terdaftar mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena pandemi covid 19 dan banyaknya para pekerja yang sudah mendapatkan pekerjaan tidak menginformasikan ke pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kalau mereka sudah bekerja.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat

5.2.1 Peran Pemerintah Daerah sebagai Stabilisator

Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan. Kaitannya peran pemerintah daerah dalam mengentaskan pengangguran dikabupaten Aceh Barat dengan memperhatikan indikator sebagai Stabilisator.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat berdasarkan hubungannya dengan pengangguran pada masyarakat yang menjadi sasaran penanggulangan pengangguran sebagaimana penelitian yang sudah dilakukan diketahui bahwa secara umum peran pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang meliputi stabilisator sudah dilakukan dengan cukup maksimal, ini bisa buktikan oleh beberapa program kebijakan daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat mampu menstabilkan dan menurunkan angka pengangguran sejak tahun 2018 sampai dengan 2021.

5.2.2 Peran Pemerintah Daerah Sebagai Inovator

Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara melalui pembangunan daerah salah satunya sebagai inovator. Pemerintah sebagai inovator menciptakan sesuatu yang baru tanpa meniadakan sesuatu yang sudah ada, dan mencoba menyelaraskannya.

Dalam hal ini hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat sebagai inovator juga sudah sangat optimal. Ini dibuktikan oleh berbagai inovasi program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan langsung di BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat yang diharapkan mampu merangsang keinginan masyarakat agar mau dan mampu melakukan produktifitas barang maupun jasa.

5.2.3 Peran Pemerintah Daerah Sebagai Motivator

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam membuat perubahan dan pengentasan pengangguran sudah cukup optimal, dikarenakan pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selain memberikan pelatihan teknis juga memberikan dorongan mental berupa wawasan pengetahuan dan melakukan pendampingan kepada pencari kerja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas menunjukkan peran pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat sebagai motivator sangatlah penting, sebab bila peran ini tidak diwujudkan secara optimal, maka sulit bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam meminimalisir pengangguran. Peran ini harus pula

diwujudkan melalui upaya menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah mencari solusi permasalahan penganguran dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan perannya sebagai motivator.

5.4 Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Penganguran di Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasanya berkaitan dengan upaya upayayang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam rangka menanggulangi masalah penganguran adalah dengan dengan meningkatkan mobalitas modal tenaga kerja dan dengan berbagai program pelatihan tenaga kerja yang dilaksanakan langsung di BLK Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Aceh Barat.

Selain itu membantu memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan bimbingan kepada pelaku usaha kecil, melakukan berbagai program pelatihan teknis, juga melakukan kerja sama dengan berbagai perusahaan di Aceh Barat dalam hal pemberian informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan di kawasan tertinggal dan juga melakukan pendataan kepada para pencari kerja agar mereka mendapatkan perlakuan khusus.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penyusun uraikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Peran Pemerintah daerah dalam dalam hal menekan angka pengangguran di Kabupaten Aceh Barat dilakukan dengan beberapa cara yaitu pemerintah daerah membantu memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan bimbingan kepada pelaku usaha kecil, melakukan berbagai program pelatihan teknis, juga melakukan kerja sama dengan berbagai perusahaan di Aceh Barat dalam hal pemberian informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan di kawasan tertinggal dan juga melakukan pendataan kepada para pencari kerja agar mereka mendapatkan perlakuan khusus.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengatasi masalah pengangguran adalah masih minimnya infrastruktur yang tersedia sehingga program pelatihan yang dilaksanakan masih terbatas hanya untuk beberapa puluhan peserta saja, Kemudian kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pekerja lokal sehingga tidak punya daya saing dengan pekerja dari luar daerah, selain itu kurangnya lapangan kerja yang tersedia pada aspek akomodatif seperti perusahaan, pabrik, market juga terus membuat para pencari kerja terus bertambah. Kemudian dampak dari pandemi juga menjadi salah satu

kendala yang cukup serius dikarenakan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga banyak perusahaan dan pelaku UMKM terganggu masa produksinya.

Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran di Aceh Barat melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu dengan meningkatkan mobalitas modal tenaga kerja dan dengan berbagai program pelatihan tenaga kerja yang dilaksanakan langsung di BLK Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Aceh Barat.

6.2 SARAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu menambah dan memperbaiki seluruh sarana prasana yang dibutuhkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Supaya proses pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bisa berjalan dengan lancar.
2. Pemerintah daerah harus memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif dan pelatihan tenaga kerja, Sehingga bisa merangsang masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif dalam berwirausaha.

3. Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan pengusaha dan pekerja dalam hal pertukaran informasi mengenai lapangan pekerjaan.
4. Pemerintah harus menyediakan panduan khusus yang ditunjukkan kepada pekerja dan perusahaan, utamanya untuk perlindungan jaminan kesehatan dan perlindungan jaminan pekerjaan yang layak sesuai norma yang berlaku di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmadi Abu, Supriyono. (2003). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Arikunto, S., 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Jakarta : Rineka Cipta.
- Desi Lestari.2010. *Kebijakan pemerintah kota dalam mengatasi pengangguran (studi di kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jambi)*
- Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. 1993. *Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari)*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Hutami, Gartiria dan Anis Chariri. 2011. *Pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah daerah(Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*.
- <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/q0733h320/peminat-kartu-pencari-kerja-di-aceh-barat-meningkat>
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moehar Daniel, 2002, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta : Bumi Aksara
- Nazir,M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nisar.2010.*Strategi pemerintah dalam menanggulangi pengangguran (studi di kecamatan Soreang Kota Parepare)*
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Sarwono. Sw.2005 . *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Fajar Interpratama.
- Sadono, Sukirno. 1994. *Pengantar Ekonomi Makro*. PT. Raja Grasindo Perseda. Jakarta.
- Sedarmayanti. (2008). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sondang P. Siagian. 2009. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta. PT Rineka Cipta

Sumarsono, Sonny. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta : Bandung.

Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

UUD 1945 Pasal 27 ayat 2

Undang undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGURANGI TINGKAT
PENGANGGURAN DI KABUPATEN ACEH BARAT (Studi Kasus : Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat)**

1. Bagaimana peran pemerintah daerah sebagai stabilisator dalam upaya menciptakan kondisi yang lebih kondusif sebagai mengentaskan pengangguran di Kabupaten Aceh Barat?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah sebagai inovator dalam membuat perubahan dan menyiapkan penanggulangan pengangguran di Kabupaten Aceh Barat?
3. Bagaimana peran pemerintah daerah sebagai motivator dalam upaya menggerakkan masyarakat jika terjadi kendala dalam proses pengentasan pengangguran di Kabupaten Aceh Barat?
4. Apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam upaya mengentaskan pengangguran di Kabupaten Aceh Barat?
5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya mengatasi pengangguran di Kabupaten Aceh Barat?
6. Bagaimana langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya mengatasi pengangguran di Kabupaten Aceh Barat?

Lampiran II

DOKUMENTASI

Foto lokasi Penelitian



Wawancara bersama bapak Muhammad Nasir Sp.d sebagai Kepala Bidang Tenaga Kerja



Wawancara dengan bapak Edy Sofian, S.E.,M.Si sebagai Kepala Bidang Trasnigrasi



Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Barat

TPAK	Laki-Laki			Perempuan			Jumlah		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Penduduk Usia 15 tahun ke Atas	61 695	63 551	-	31 069	29 328	-	92 764	92 879	-
1. Angkatan Kerja	57 201	58 562	63 580	28 654	27 540	31 987	85 855	86 102	95 567
Bekerja	4 494	4 989	59 288	2 415	1 788	29 502	6 909	6 777	88 790
Pengangguran	15 064	15 870	4 292	43 785	47 582	2 485	58 849	63 452	6 777
2. Bukan Angkatan Kerja	8 424	7 015	17 274	9 090	9 367	46 317	17 514	16 383	63 591
Sekolah	2 566	3 279	7 158	33 720	35 287	7 428	36 286	38 566	14 586
Mengurus Rumah Tangga	4 074	5 575	3 977	975	2 928	34 854	5 049	8 503	38 831
Lainnya	76 759	79 421	6 139	74 854	76 910	4 035	151 613	156 331	10 174
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	80	80	79	42	38	41	61	59	60
4. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)(%)	8	92	93	8	94	92	8	93	93
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPU)(%)	7	8	7	8	6	8	7	7	7

Showing 1 to 11 of 11 entries

Data Series: 2019-2021 2019-2018

Acch Barat Dalam Angka 2020 telah terbit. Silahkan di unduh pada menu Publikasi || Sampaikan saran dan pengaduan anda tentang pelayanan kami pada link berikut : <https://s.bp>

Sumber: BPS Aceh Barat 2022

BIODATA PENULIS

Nama : T Harri Setiawan
Nim : 1505905010108
Tempat, Tanggal Lahir : Meunasah Buloh, 30 November 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nama Orang Tua : Teuku Toeng dan Cut Zainab
Jumlah Saudara Kandung : Satu (Cut Hartati)
Alamat : Desa Meunasah Buloh, Kecamatan Kaway XVI,
Kabupaten Aceh Barat
Email : teukuharry2@gmail.com
Pendidikan Formal : SD N 1 Aleu Tampak
Mtsn 2 Aceh Barat
SMK N 2 Meulaboh